

Sejarah Mangupura Sebagai Ibu Kota Kabupaten Badung Tahun 1992-2009

History of Mangupura As a Capital City of Badung Distric, 1992-2009

I Putu Mega Ambara Putra, I Nyoman Bayu Pramatha

Prodi Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP PGRI Bali

Jl. Seroja Tonja-Denpasar Utara, Bali (80239)

*Pos-el: megaambara@gmail.com, pramarthabayu@gmail.com

Abstrak. Dalam rangka mencari karakteristik ibu kota di Indonesia, ada beberapa gagasan lokal mengenai perkotaan dengan fungsi ruang yang berbeda-beda, akan tetapi tidak semua daerah memiliki pemukiman urban, sehingga dengan pembeberan konsep-konsep lokal akan diketahui antara hubungan antara fungsi ruang masing-masing, maupun lingkungan sekitarnya. Dari zaman modern ini pusat perkotaan mempunyai fungsi lebih sebagai kawasan pelayanan dalam memaknai kota tersebut, maka lebih banyak identitas kota tersebut ditonjolkan berdasarkan tujuan fungsi kota, seperti kota pendidikan, perdagangan, rekreasi, budaya atau kota pusat pemerintahan. Maka pada tahun 1992, Kabupaten Badung kembali dikembangkan menjadi dua wilayah yakni Daerah Kota Madya Denpasar, dengan Ibu Kota Denpasar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Demikian, dua pemerintahan kota/kabupaten itu sekaligus diresmikan, tanggal 27 Februari 1992, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tk.II Denpasar Kota Denpasar. Untuk sementara, pusat, Ibu Kota Daerah Tk.II Badung masih terletak di Kota Denpasar (Lumintang). Namun tidak seorang pun menduga, pusat pemerintahan Badung di Lumintang terbakar sesudah satu kegiatan pemilihan umum yang mengecewakan masyarakat Bali tepatnya 20 Oktober 1999. Fenomena tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah di atas menjadi sebuah kajian atau bahan penelitian dengan judul “Sejarah Mangupura Sebagai Ibu Kota Kabupaten Badung dari Tahun 1992-2009”.

Kata-Kata Kunci : Mangupura Kabupaten Badung.

Abstract. In order to find the characteristics of the capital city in Indonesia, there are several local ideas about urban areas with different spatial functions, but not all regions have urban settlements, so by exposing local concepts it will be known between the relationships between their respective spatial functions, and the surrounding environment. From this modern era the urban center has more functions as a service area in interpreting the city, so more identity of the city is highlighted based on the purpose of the city function, such as the city of education, commerce, recreation, culture or city government center. So in 1992, Badung Regency re-developed into two regions namely the Madya City of Denpasar, with the Capital City of Denpasar and the District of Badung Level II. Thus, the two municipal / district governments were simultaneously inaugurated, on February 27, 1992, based on Law No. 1 of 1992 concerning the Establishment of the Municipal Municipality of Denpasar Tk.II Denpasar City of Denpasar. For a while, the center, the Regional Capital of Badung Tk.II is still located in Denpasar City (Lumintang). But no one suspects, the Badung government center in Lumintang caught fire after an election activity that disappointed the Balinese people precisely on October 20, 1999. The above phenomenon then the writer felt interested in raising the problem above into a study or research material with the title "History of Mangupura As Badung Regency Capital City from 1992 -2009 ".

Keywords: Mangupura, Badung Regency.

PENDAHULUAN

Kurang lebih 16 tahun lamanya Kabupaten Badung tidak memiliki pusat pemerintahan yang tetap (nomaden), tepatnya sejak ditetapkannya Kotif Denpasar menjadi Kota Madya tahun 1992, dan mengambil pusat kota Kabupaten Badung menjadi pusat kota (kini Pemkot), sehingga Badung harus mencari pusat pemerintahan yang baru.

Akibat pemekaran tersebut Kabupaten Badung selanjutnya membangun Pusat Pemerintahan (Puspem) Dharma Praja di Lumintang, Denpasar sebagai pusat kegiatan pemerintahannya. Pada perkembangan selanjutnya, tahun 1996 Pemerintah Kabupaten Badung membuat rencana membangun Puspem baru, yang terintegrasi dalam satu kawasan (tidak terpecah), serta berlokasi di wilayah administratif Kabupaten Badung. Perencanaan pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung (Puspem Kabupaten Badung) pertama kali ditetapkan pada tahun 1996 melalui Keputusan Bupati Badung No. 262 Tahun 1996 tentang Pengaturan Peruntukan dan Penggunaan Tanah Lokasi Rencana Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Ditetapkan luas Puspem Kabupaten Badung saat itu sekitar 110 hektar dan berlokasi di Kelurahan Lukluk yaitu sebelah barat jalan jurusan Lukluk-Penarungan antara km 12.278 s.d. km 13.080. Dalam perkembangan selanjutnya, diputuskan lokasi Puspem Kabupaten Badung dipindah ke Kelurahan Sempidi (sebelah utara Balai Diklat Kabupaten Badung) seluas 46,677 hektar termasuk seluruh lahan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Badung saat itu (seluas 11,225 hektar).

Mengwi, diputuskan bahwa lokasi Puspem Kabupaten Badung di Kelurahan Sempidi ditetapkan sebagai kawasan pusat kantor pemerintahan. Sebagai pusat kantor pemerintahan dan pusat pelayanan public di Kabupaten Badung, keberadaan Puspem

Hal itu berdasarkan rekomendasi DPRD Badung yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Badung No. 362 Tahun 2004 tentang penetapan lokasi Puspem Kabupaten Badung. Lokasi pembangunan kantor Puspem Kabupaten Badung yang berada di Kelurahan Sempidi didasarkan atas beberapa pertimbangan, salah satunya adalah pertimbangan aksesibilitas. Posisi Kelurahan Sempidi yang strategis berada tepat ditengah-tengah Kabupaten Badung dilihat dari arah utara-selatan maupun arah timur-barat pada bentang alam dengan topografi relatif datar mengakibatkan pencapaian ke lokasi Puspem Kabupaten Badung dapat dijangkau dengan lebih mudah dari berbagai kecamatan di Kabupaten Badung. Jalur menuju Puspem Kabupaten Badung dapat dicapai dari jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer melalui enam jalur utamayang telah ada, yaitu dua jalur ke arah utara menuju wilayah Kecamatan Mengwi bagian utara, Abiansemal dan Petang, dua jalur ke arah timur menuju wilayah Kecamatan Abiansemal, dan dua jalur ke arah selatan menuju wilayah Kecamatan Mengwi bagian Selatan, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan. (Penyesuaian RTRK Ibukota Kabupaten Badung, 2011).

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Daerah Tingkat II Badung Nomor 29 Tahun 1995 (yang berlaku sepuluh tahun hingga 2005), lokasi Puspem Kabupaten Badung saat itu masih ditetapkan sebagai kawasan pertanian. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Badung pada tahun 2004 melakukan revisi RTRWK dan dikeluarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 533 tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kabupaten Badung secara tidak langsung mendorong kawasan pada lokasi Puspem menjadi pusat tarikan pergerakan masyarakat. Hal ini mempercepat terwujudnya fungsi kawasan tersebut menjadi kawasan perkotaan. Dengan

demikian suatu kota atau kawasan perkotaan adalah kawasan yang memiliki pemusatan jumlah penduduk lebih tinggi dari kawasan sekitarnya yang ditandai dengan adanya pusat kegiatan sosial dan ekonomi. Kawasan perkotaan di Kabupaten Badung ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan ibukota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi. Kawasan perkotaan tersebut selanjutnya merupakan wilayah yang berperan sebagai ibukota kabupaten, dengan nama ibukota diganti dari Denpasar menjadi Mangupura. Wilayah administratif Kawasan Perkotaan Mangupura dibentuk dari sembilan desa/kelurahan.

METODE PENELITIAN

Pemilihan Topik

Dalam penulisan dan penelitian ada beberapa tahap (metode) yang dilakukan sebelum sampai pada penulisan sejarah. Pada umumnya ada 4 tahap yang harus dilalui dalam penulisan dan penelitian sejarah, yaitu : (1) Heuristik, (2) Kritik Sumber (Verifikasi Data), (3) Interpretasi dan (4) Historiografi. Sebelum memasuki keempat tahap yang telah disebutkan diatas, hendaknya peneliti menentukan terlebih dahulu pemilihan topik penelitian yang akan dikaji nantinya. Pada umumnya pada saat pemilihan topik penulis akan mengalami kesulitan, bukan karena sedikitnya pilihan yang akan di angkat melainkan karena dalam sejarah Indonesia banyak hal baru yang diangkat sebagai bahan penelitian.

Heuristik

Heuristik berasal dari kata Yunani *hueriskan* yang artinya memperoleh. Heuristik adalah teknik atau cara-cara untuk menemukan sumber yang bisa didapatkan melalui studi kepustakaan, pengamatan secara langsung di lapangan (Jika memungkinkan), melalui interview untuk sejarah kontemporer.

Yang terdapat di Kecamatan Mengwi, meliputi Desa Mengwi, Desa Gulingan, Desa Mengwitani, Desa Kekeran, Kelurahan Kapal, Kelurahan Abianbase, Kelurahan Lukluk, Kelurahan Sading dan Kelurahan Sempidi. Pembentukan kawasan perkotaan Mangupura dilatarbelakangi oleh kecenderungan dan arah pengembangan kawasan tersebut menjadi suatu perkotaan. Hal ini didukung oleh beberapa fungsi pelayanan regional yang telah ada, antara lain Terminal Type A Mengwi, pusat pelayanan kesehatan RSUD Badung, pasar umum Beringkit, serta kawasan perkantoran Kodim dan Polres Badung.

Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah sumber pendukung dari sumber utama atau sumber yang disampaikan bukan oleh saksi mata. Bentuk-bentuk sumber sekunder adalah berupa buku yang bukan ditulis oleh saksi mata.

Kritik Sumber

Setelah memperoleh sumber, tentu saja sumber-sumber itu tidak begitu saja langsung digunakan namun dikritik terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menyaring sumber mana yang layak untuk digunakan dan mana yang tidak layak. Dengan demikian sumber sejarah yang diperoleh harus terlebih dahulu disaring melalui kritik eksternal maupun internal untuk menghindari subjektifitas dan mendekati objektifitas.

Kritik Eksternal

Kritik Eksternal adalah penentuan asli atau tidaknya suatu sumber atau dokumen. Idealnya seseorang menemukan sumber yang asli bukan rangkapnya apalagi foto copynya. Apa lagi jaman sekarang kadang-kadang sulit membedakan asli atau bukan. Verifikasi atau pengujian sumber pada tahap ini, menyangkut aspek-aspek luar

dari sumber tersebut, dimana dan siapa penulis sumber.

Kritik Internal

Kritik Internal adalah penentuan dapat tidaknya keterangan dokumen digunakan sebagai fakta sejarah. Biasanya yang dicari adalah keterangketerangan yang benar.

Interpretasi

Fakta yang terkumpul dan telah siap untuk digunakan itu belum berguna, jika belum diberi arti. Fakta nampak mempunyai arti bila telah dimulai dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain, inilah permulaan mengadakan penafsiran fakta. Interpretasi adalah penetapan makna dan saling hubungan antara fakta-fakta yang diperoleh.

Historiografi

Historiografi adalah penulisan hasil penelitian. Historografi adalah rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses. Penulisan laporan disusun berdasarkan serialisasi (kronologis, kausasi, dan imajinasi). Penulisan sejarah sedapat mungkin disusun berdasarkan kronologis ini sangat penting agar peristiwa sejarah tidak menjadi kacau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung Dari Lumintang Ke Mengwi Tahun 1992-2009

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Daerah Tingkat II Badung Nomor 29 Tahun 1995 (yang berlaku sepuluh tahun hingga 2005), lokasi Puspem Kabupaten Badung saat itu masih ditetapkan sebagai kawasan pertanian. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Badung pada tahun 2004 melakukan revisi RTRWK dan dikeluarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 533 tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mengwi, diputuskan bahwa

lokasi Puspem Kabupaten Badung di Kelurahan Sempidi ditetapkan sebagai kawasan pusat kantor pemerintahan. Sebagai pusat kantor pemerintahan dan pusat pelayanan publik di Kabupaten Badung, keberadaan Puspem Kabupaten Badung secara tidak langsung mendorong kawasan pada lokasi Puspem menjadi pusattarikan pergerakan masyarakat. Hal ini mempercepat terwujudnya fungsi kawasan tersebut menjadi kawasan perkotaan. Dengan demikian suatu kota atau kawasan perkotaan adalah kawasan yang memiliki pemusatan jumlah penduduk lebih tinggi dari kawasan sekitarnya yang ditandai dengan adanya pusat kegiatan sosial dan ekonomi. Kawasan perkotaan di Kabupaten Badung ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan ibukota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi. Kawasan perkotaan tersebut selanjutnya merupakan wilayah yang berperan sebagai ibukota kabupaten, dengan nama ibukota diganti dari Denpasar menjadi Mangupura. Wilayah administratif Kawasan Perkotaan Mangupura dibentuk dari Sembilan desa/kelurahan. Yang terdapat di Kecamatan Mengwi, meliputi Desa Mengwi, Desa Gulingan, Desa Mengwitani, Desa Kekeran, Kelurahan Kapal, Kelurahan Abianbase, Kelurahan Lukluk, Kelurahan Sading dan Kelurahan Sempidi. Pembentukan kawasan perkotaan Mangupura dilatarbelakangi oleh kecenderungan dan arah pengembangan kawasan tersebut menjadi suatu perkotaan. Hal ini didukung oleh beberapa fungsi pelayanan regional yang telah ada, antara lain Terminal Type A Mengwi, pusat pelayanan kesehatan RSUD Badung, pasar umum Beringkit, serta kawasan perkantoran Kodim dan Polres Badung.

Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung Dari Lumintang ke Mengwi Tahun 1992-2009

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perpindahan ibu kota kabupaten badung diantaranya dari faktor politik, ekonomi, sosial, geografi, dan sejarah. Semua faktor ini saling terkait sehingga ibu kota kabupaten badung akhirnya dipindahkan ke mengwi denga nama mangupura

SIMPULAN Dan SARAN

Terjadinya pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung dari Lumintang Ke Mengwi Tahun 1992-2009 yakni: Ketika pada tahun 1992, Badung kembali dikembangkan menjadi dua wilayah yakni daerah Kota Madya Denpasar dengan Ibu Kota Denpasar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Kedua pemerintahan kota/ kabupaten itu sekaligus diresmikan tanggal 27 Februari 1992 berdasarkan UU No. 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Dati II Denpasar. Untuk sementara, pusat Ibu Kota Dati II Badung masih terletak di Kota Denpasar (Lumintang). Ketika periode pertama (2005-2010) tahun kedua (tahun 2006) dari kepemimpinan Anak Agung Gde Agung (Bupati Badung ke tiga sejak lepasnya Kota Denpasar), dirintis untuk membangun pusat pemerintahan yang terfokus pada satu lokasi dan menetapkan nama untuk Ibu Kota Kabupaten Badung dengan kekuasaan yang dimilikinya. Proses Pemilihan nama Mangupura sebagai nama Ibu Kota Kabupaten Badung Tahun 1992-2009 yakni: Tepatnya pada hari Selasa, 25 November 2008 diadakan sebuah semiloka untuk membahas nama Ibu Kota kabupaten Badung bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Badung. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bersama bahwa Ibu Kota Kab Badung adalah Mangupura. Dari hasil ini kemudian ditindak lanjuti dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Badung berdasarkan Kep. No. 14 2009 perihal

Persetujuan Penetapan Wilayah Ibu Kota dan nama Mangupura sebagai Ibu Kota Kababupaten Badung. Selanjutnya melalui surat Bupati Badung kepada Gubernur Bali No. 050/ 2212/ Bappeda, Litbang tanggal 14 Juli 2009 perihal Pengusulan Nama Kota Kabupaten Badung, Gubernur Bali meneruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat no. 120/4984/B.Pem, tanggal 24 Juli 2009 perihal pengusulan Nama Kabupaten Badung. Dari pengusulan tersebut keluarlah PP No. 67 tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari wilayah Kota Denpasar ke wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Ibu Kota Badung telah ditetapkan pada tanggal 16 November 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena memiliki payung hukum yang jelas secara normatif yaitu PP No. 67/2009 tentang pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dan penetapan Mangupura sebagai Ibu Kota Kabupaten Badung.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Alit Konta, 1977. "Puputan Badung Bandana Pralaya". Puri Daging Kawwi-Denpasar-Bali.
- Adlin, Alfathri, ed. 2006. *Spiritualitas dan Realitas Kebudayaan Kontemporer*, Bandung School of Thought: Humanity and Cultural Studies, Jalasutra: Yogyakarta.
- Agastia, I B., 2001. *Dang Hyang Nirartha*, Rasmi Sancaya, terjemahan, Yayasan Dharma Sastra: Denpasar.
- Ardika, I Wayan, Parimartha, I Gde, AA Bagus Wirawan. 2013. "Sejarah Bali Dari Prasejarah Hingga Modern" Udayana University Press.
- Asri, Edy. 2010. *Lima Tahun Jejak Langkah AA Gde Agung Membangun Badung* (Cuplikan

- Peristiwa dalam Berita), Penerbit Pustaka Denpost, Denpasar.
- Astra, I Gede Semadi, 2000. *Kamus Sanskerta-Indonesia Milik Pemerintah Provinsi Bali*, Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehidupan Beragama Tersebar di 9 (Sembilan) Kabupaten/ Kota: Denpasar.
- Bambang Sumadio, ed. 1984. *Jaman Kuna*, dalam *Sejarah Nasional Indonesia II*, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nograho Notosusanto, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, PN Balai Pustaka: Jakarta.
- Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung 2011, "MANGUPURA IBU KOTA KABUPATEN BADUNG.
- Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, 2002. *Babad Mengwi, Babad Kaba-Kaba, Pamancangah Dalem Kramas (Bendesa Mas)*.
- , 1987. *Pura Besakih*, Proyek Penyusunan dan Penerbitan Buku, Denpasar.
- Gabriel Ika "Anak Agung Gde Agung 10 Tahun Membangun Badung," yang ditulis oleh : Cetakan I : Juli 2015.
- Gede Suwitha, I Putu. (2013) "Mangupura sebagai Ibu Kota Kabupaten Badung: Suatu Penelusuran Historis dan Pengembangan Wilayah".
- Goris, R. 1948. *Sejarah Bali Kuna: Singaraja*.
- , 1951/52. *Inscripties Voor Anak Wungsu (Prasasti Bali): Singaraja*.
- Henk Schulte Nordholt, 2006. "The Speell Of Power", Cetakan : I *Sejarah Politik Bali 1650-1940*, Penerjemah Ida Bagus Putra Yadnya.
- I BG Wira Wibawa Mantra, 2008. *Makna Ibu Kota Bagi Sebuah Kabupaten*.
- Kartodirdjo, Sartono, 1975. *Sejarah Nasional Indonesia II*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta.
- Kempers, Bernet A.J. 1960. *Bali Purbakala, Petunjuk Tentang Peninggalan Purbakala Di Bali*, Tjetakan kedua, disalin oleh Drs. R. Soekmono, PT Penerbit dan Balai Buku "Ihtiar": Djakarta.
- Mangupura Jantung Kota Kebanggaan Kabupaten Badung, http://www.badungkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3589&Itemid=27 diunduh 12 Mei 2011.
- Mardiwarsito, L, 1985. *Kamus Jawa Kuna-Indonesia*, Nusa Indah: Ende-Flores-NTT.
- Muljana, Slamet, 1983. *Pemugaran Persada Leluhur Majapahit*, Inti Dayu Press: Jakarta.
- , 1979. *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*, Bhratara Karya Aksara: Jakarta.
- Mutra, IG. A.N. dan Meregeg, IG.G.K, 1972. *Ramayana*, Penerbit Widya Sabha: Tabanan.
- Nala, Ngurah, 1991. *Ayur Veda, Ilmu Kedokteran Hindu*, Upada Sastra: Denpasar.
- Parimarta, I Gde. 2008. "Sejarah Perkembangan Badung Dari Menculuk Ke Mengwi".

Parisada Hindu Dharma Pusat, 1978.
Upadesa.

Pemkab Badung, 2010. *Sejarah
Perkembangan Badung*.

Peter Beilharz, 2016. Teori-Teori Sosial
Observasi Kritis Terhadap Para
Filosof Terkemuka”. Cetakan : IV,

Punyatmadja, Ida Bagus Oka, 1992. *Panca
Sradha*, Yayasan Dharma Sarathi:
Jakarta.

Simpen, I Wayan, 1957. *Sedjarah Bali*,
Pustaka Balimas, Djalan Wahidin
no 1, Denpasar-Bali.

Soegianto S., 1999. Perjalanan Dang
Hyang *Nirartha*, *Sebuah
Dharmayatra* (1478-1560) dari
Daha Sampai Tambora, BP,
Jatibening: Bekasi.

Soekmono, 1974. Pengantar Sejarah
Kebudayaan Indonesia, Kanisius:
Yogyakarta.

Suada, I Nyoman 2014. Bali Dalam
Perspektif Sejarah Dan Tradisional
Dalam Relevansinya Dengan Era
Global Menuju Kejayaan Bali
Yang Harmonis”. Edisi revisi.

Sukada, I Nyoman, 1984. Babad Mengwi,
Denkayu, Mengwi Badung”.
Pustaka Pribadi.

Swandika, Kompiang R 2008. “Arah
Perkembangan Kabupaten Badung
Untuk Masa Yang Akan Datang”,

Team Penyusun, 1980. *Sejarah Bali*,
Pemda Provinsi Daerah Tingkat I
Bali.